KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR** **DIVISI ADMINISTRASI**	**NOMOR SOP**	**W22-7754.OT.02.02**
	TANGGAL PEMBUATAN	**1 SEPTEMBER 2023**
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH **KEPALA KANTOR WILAYAH** **MARCIANA DOMINIKA JONE** **NIP 19641126 199103 2 001**	
	NAMA SOP :	**PELAKSANAAN USULAN REVISI ANGGARAN BELANJA MODAL YANG MENDAPATKAN REKOMENDASI DARI BAGIAN PROGRAM DAN HUMAS KANWIL SERTA BAGIAN UMUM KANWIL**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunana Rencana Kerja dan Anggaran; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hask Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja kementerian Negara/Lembaga; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	1. Memahami tentang Standar Biaya Masukan dan Satndar Biaya Keluaran 2. Memahami tentang kaidah penganggaran seeprti Program, Kegiatan, Klasifikasi Output, Rincian Output, Komponen, Sub Komponen serta Bagan Akun Standar 3. Memahami tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 4. Memahami Rencana Kerja Pemerintah
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
SOP Pelaksanaan Penelitian Dokumen RKA-KL Kantor Wilayah dan Satuan Kerja	1. Perangkat Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet/Telekomunikasi 3. Perangkat Software/Aplikasi 4. Disposisi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan usulan revisi anggaran belanja modal rekomendasi dari Kantor Wilayah tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN USULAN REVISI ANGGARAN BELANJA MODAL YANG MENDAPATKAN REKOMENDASI DARI BAGIAN PROGRAM DAN HUMAS KANWIL SERTA BAGIAN UMUM KANWIL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		KASATKER	KAKANWIL	KADIVMIN	KABAG PH DAN KABAG UMUM	DIRJEN / KA BADAN / SETJEN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengusulkan dokumen anggaran belanja modal	MULAI					usulan	1 hari	dokumen usulan revisi anggaran belanja modal
2	Mendisposisi dokumen usulan revisi anggaran belanja modal Satuan Kerja						dokumen usulan revisi anggaran belanja modal	10 menit	disposisi Kakanwil
3	Mendisposisi dokumen usulan revisi anggaran belanja modal Satuan Kerja				T		dokumen usulan revisi anggaran belanja modal dan disposisi Kakanwil	10 menit	disposisi Kadivmin
4	Membuat rekomendasi terhadap dokumen usulan revisi anggaran belanja modal						dokumen usulan revisi anggaran belanja modal dan disposisi Kadivmin	3 hari	rekomendasi usulan revisi anggaran belanja modal
5	Membuat surat usulan dokumen revisi anggaran belanja modal				Y		rekomendasi usulan revisi anggaran belanja modal	1 hari	konsep Surat usulan
6	Mengusulkan dokumen revisi anggaran belanja modal Satuan Kerja						konsep Surat usulan dan dokumen revisi anggaran belanja modal	1 hari	Surat usulan dan dokumen revisi anggaran belanja modal
7	Menerima hasil rekomendasi revisi anggaran belanja modal Satuan Kerja (Kewenangan Kanwil DJPB)						rekomendasi revisi anggaran belanja modal	1 hari	rekomendasi revisi anggaran belanja modal
8	Menerima usulan dokumen revisi anggaran belanja modal Satuan Kerja untuk diteliti (Kewenangan DJA)					SELESAI	Surat usulan dan dokumen revisi anggaran belanja modal	1 hari	Surat usulan revisi anggaran belanja modal